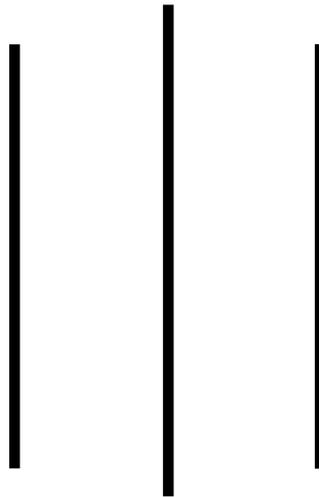




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PERINDUSTRIAN**

2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya sehingga LKIP Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020 ini dapat disusun.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melaporkan pencapaian kinerja sebagai bahan pertanggungjawaban dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi unit kerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah merangkum seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2020.

Sebagai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) periode bulan Januari sampai dengan Desember 2020 yang telah dilalui, kami sadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna perbaikan pada penyusunan LKIP pada tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Tahun 2020 Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

Akhirnya semoga LKIP Tahun Anggaran 2020 ini memberikan kontribusi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance) secara umum di Kabupaten Tapin dan secara khusus pada lingkungan Dinas Perindustrian.

Kepala Dinas Perindustrian
Kabupaten Tapin,

Rosaria Sari, AP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19740415 199311 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan “*Good Governance*”, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

LKIP ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2020, yang diformulasikan dari hasil kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dikarenakan setiap SKPD dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsinya serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
1. Struktur Organisasi.....	2
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020	14
2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun 2019	15
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	17
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	18
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	21
6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	23
B. REALISASI ANGGARAN	23
BAB IV PENUTUP.....	26

DAFTAR LAMPIRAN :

Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja

Lampiran 2 : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Lampiran 3 : Indikator Kinerja Utama (IKU)

Lampiran 4 : Laporan Capaian Kinerja Per Triwulanan

Lampiran 5 : Laporan Pengawasan Anggaran Definitif Per Kegiatan (SIMDA)

Lampiran 6 : Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selanjutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

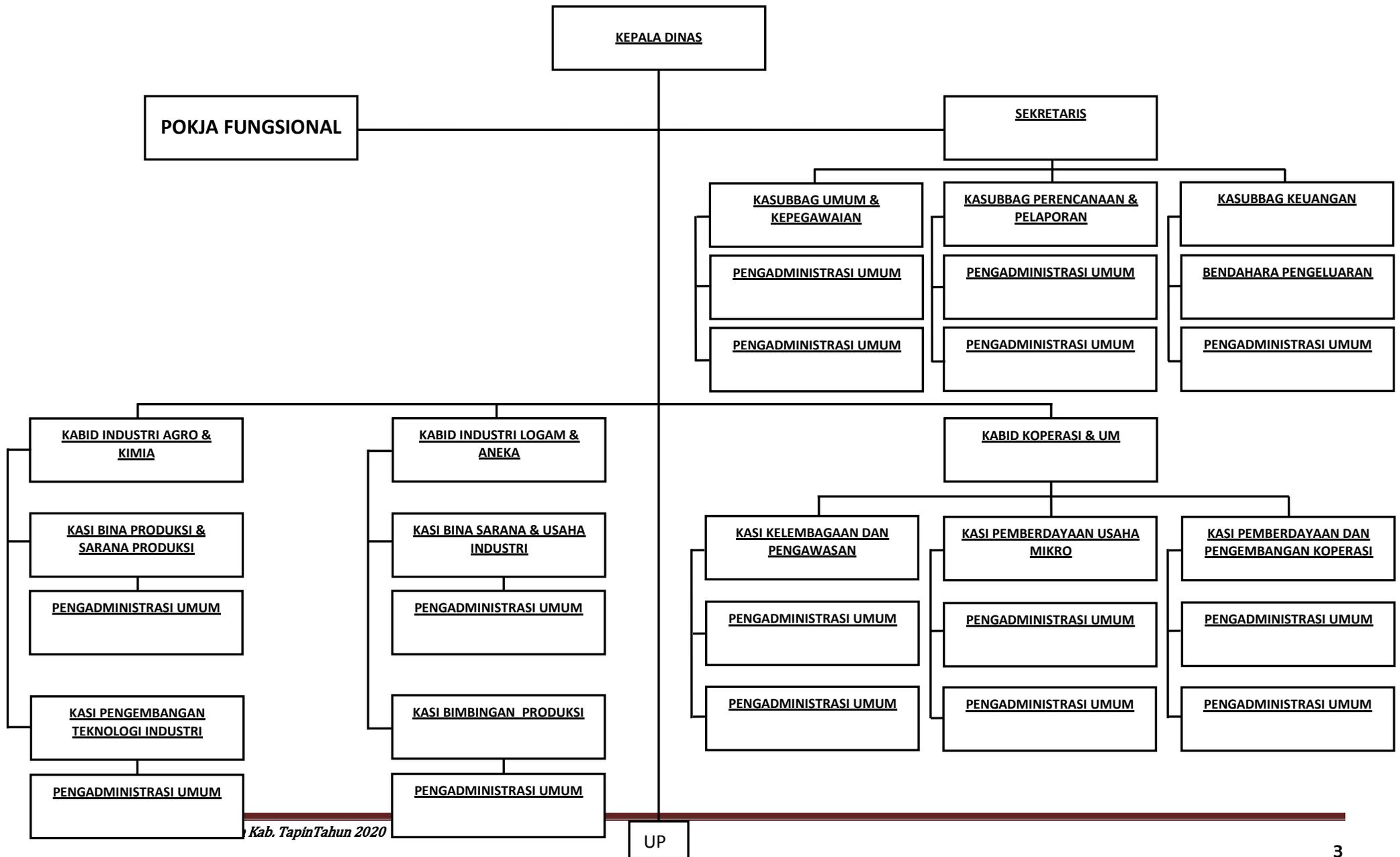
Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya “*Good Governance*”.

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah antara lain Dinas Perindustrian, maka Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan ditetapkannya Perda Nomor 09 Tahun 2016 secara konsekuensi membawa perubahan terhadap perangkat daerah dan struktur organisasi teknis kelembagaan yang ada di Kabupaten Tapin.

Pemisahan kembali Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjadi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Kemudian di pertegas kembali dalam Keputusan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Adapun uraian tugas yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi penetapan rencana pembangunan industri kabupaten;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang Industri kerajinan dan aneka;
- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- g. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi terhadap Unit Pelaksana Teknis;
- h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

C. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi Organisasi

Permasalahan utama adalah isu strategis yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, permasalahan utama diidentifikasi dari berbagai sumber antara lain diangkat dari situasi dan kondisi ekonomi saat ini serta kemungkinan kondisi dimasa depan.

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi permasalahan dari berbagai aspek pembangunan Perindustrian Kabupaten Tapin dapat dirumuskan beberapa kebijakan permasalahan utama atau isu-isu srategis yang dihadapi. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting baik bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) maupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada setiap masing-masing periodenya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD dapat dibagi ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berada diluar kewenangan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Berikut akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin :

a. Faktor Internal

- 1) Pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal.
- 2) Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat.
- 3) Kurangnya promosi hasil produk UM dan IKM.
- 4) Pembinaan pengrajin yang belum optimal.
- 5) Kapasitas SDM pengurus koperasi yang masih rendah.

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurangnya minat masyarakat terhadap kerajinan khas daerah.
- 2) Kualitas sumber daya manusia pelaku usaha pengrajin masih terbatas.
- 3) Bahan baku produksi dan bahan pendukung produksi yang masih sulit diperoleh dan harga bahan baku yang kurang kompetitif.
- 4) Hillirisasi industri dan industri yang bernilai tambah masih belum optimal.
- 5) Peningkatan Produktivitas dan Kompetensi SDM Industri masih belum optimal.
- 6) Kurang terampilnya sumber daya manusia yang ada terhadap penerapan dan penggunaan teknologi industri secara tepat dan efisien.
- 7) Rendahnya tingkat partisipasi anggota dalam pengembangan kegiatan usaha koperasi.
- 8) Kurang tersosialisasi peraturan perkoperasian pada gerakan koperasi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka diharapkan melalui Perjanjian Kinerja terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud oleh kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, bahwa Kepala Daerah terpilih sudah menetapkan Visi pembangunan, yaitu : **“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”**. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban oleh Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.

2. Misi Kedua

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

3. Misi Ketiga

Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

4. Misi Keempat

Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Misi Kelima

Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi pembangunan tersebut, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin terkait dengan Misi Kedua “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa ” dengan tujuan “ Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah ” yang kemudian dituangkan dalam 2 (dua) sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
2. Meningkatnya sektor koperasi dan UKM.

Dari kedua sasaran diatas, maka dihasilkan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sebagai alat ukur atas keberhasilan dan kegagalan yang kemudian menjadi kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan adanya Perjanjian Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Tahun 2018-2023. Berikut ini adalah tabel Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian Tahun 2020 :

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perindustrian Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	29,9%
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	82%
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,24%

	Program		Anggaran :	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	887.720.260	APBD
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	164.450.000	APBD
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp	11.000.000	APBD
4	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Rp	3.025.000	APBD
5	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp	30.025.000	APBD
6	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp	42.487.500	APBD
7	Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	Rp	732.100.000	APBD
8	Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	Rp	170.530.000	APBD
	Jumlah Anggaran :	Rp	2.041.337.260	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang direncanakan. Manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan pada level keluaran (*output*) maupun hasil (*outcome*). Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip “*Good Governance*” dimana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas, yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Dalam hal ini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Sedangkan untuk skala pengukuran ordinal (skala penilaian) terhadap kinerja pemerintah adalah sebagai berikut :

- 85% - 100% : Sangat Berhasil
- 70% - <85% : Berhasil
- 55% - <70% : Cukup Berhasil
- <55% : Tidak Berhasil

Indikator Kinerja pada LKIP Kabupaten Tapin yang terkait dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yang diantaranya adalah :

- ✓ Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB, dan

Lapangan Usaha	Tahun		
	2017	2018	2019
A Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	21,88	20,54	21,22
B Pertambangan dan Penggalian	27,81	28,61	26,53
C Industri Pengolahan	7,03	6,83	6,85
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,32	0,33
F Konstruksi	5,66	5,71	5,86
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,86	10,17	10,65
H Transportasi dan Pergudangan	3,19	3,25	3,33
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,31	2,36	2,40
J Informasi dan Komunikasi	3,55	3,63	3,72
K Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,18	1,24
L Real Estate	1,40	1,41	1,43
M,N Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,70	7,72	8,08
P Jasa Pendidikan	5,16	5,24	5,32
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,85	1,85
R,S,T,U Jasa lainnya	0,95	0,97	0,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	100,00	100,00	100,00

Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018: Angka sementara, Tahun 2019: Angka sangat sementara

Berdasarkan tabel diatas Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapin dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sebesar 7,03% kemudian mengalami penurunan sebesar 0,2% di tahun 2018 menjadi 6,83%, setelah itu kembali meningkat sebesar 0,02% di tahun 2019 menjadi 6,85%. lebih rendah dari target Pemerintah Kabupaten Tapin untuk tahun 2020 sebesar 7,4% , terdapat selisih sebesar 0,55%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2019 dikarenakan data untuk tahun 2020 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja organisasi digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi sebagai salah satu

upaya untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

1. Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara Target dan Realisasi adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Dinas Perindustrian pada tahun yang bersangkutan telah sesuai dengan target yang telah di rencanakan sebelumnya :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Sasaran (%)	Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi			
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM						
Persentase Koperasi Berkualitas	%	29,90	25,64	85,75%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	Bidang Koperasi dan UM
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	82	83	101,21%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	Bidang Koperasi dan UM
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri						
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,24	6,13	98,23%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	BPS

Untuk penjelasan atas capaian indikator kinerja diuraikan sesuai pada setiap sasaran sebagaimana dibawah ini :

a) Sasaran Strategis I

Sasaran strategis "Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM" terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : Persentase Koperasi Berkualitas (dengan persentase capaian sasaran: 85,75%) dan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat (101,21%).

Secara keseluruhan, realisasi capaian kinerja semua indikator sasaran strategis I berada di atas angka 85% atau dengan rata-rata persentase mencapai angka 93,48%.

b) Sasaran Strategis II

Sasaran strategis “Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri” dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: Persentase PDRB Sektor Perindustrian (dengan persentase capaian sasaran: 98,23%). Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin

Berdasarkan data dari BPS Kab. Tapin Persentase PDRB Sektor Perindustrian Kab. Tapin tahun 2019 sebesar 6,13% lebih tinggi dari Kabupaten Balangan pada tahun yang sama sebesar 1,54%, terdapat selisih sebesar 4,59%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2019 dikarenakan data untuk tahun 2020 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu ataupun tahun terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun-tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dengan Realisasi kinerja Tahun 2020 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi (2020)	Capaian Sasaran (%)	Realisasi (2019)	Capaian Sasaran (%)	Realisasi (2018)	Capaian Sasaran (%)	Sumber Data
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM								
Persentase Koperasi Berkualitas	%	25,64	85,75	25,64	93,57	25,64	102	Bidang Koperasi dan UM
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	83	101,21	83	103,75	80	102	Bidang Koperasi dan UM
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri								
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,13	98,23	6,14	98,71	6,21	100	BPS

- a. Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Realisasi Kinerja Tahun 2020 sama dengan Tahun 2019 dan tahun 2018 sedangkan Capaian Kinerja Tahun 2020 lebih rendah dari Tahun 2019 dan Tahun 2018.
- b. Indikator Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk Realisasi Kinerja Tahun 2020 sama dengan Tahun 2019 dan lebih tinggi dari Tahun 2018 sedangkan Capaian Kinerja Tahun 2020 lebih rendah dari Tahun 2019 dan Tahun 2018.
- c. Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 lebih rendah dari Tahun 2019 dan Tahun 2018.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaian setiap tahunnya telah sesuai dengan perencanaan Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin (Renstra Tahun 2018-2023).

Berikut ini adalah tabel Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin beserta target dan realisasinya sampai dengan tahun 2020 yang termuat dalam Renstra 2018-2023 :

SASARAN		Target Kinerja Sasaran pada tahun					
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
		Target (Realisasi)	Target (Realisasi)	Target (Realisasi)	Target	Target	Target
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	25% (25,64%)	27,4% (25,64%)	29,90% (25,64%)	32,5%	35%	37,6%
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	78% (80%)	80% (83%)	82% (83%)	84%	86%	88%
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,21% (6,21%)	6,22% (6,14%)	6,24% (6,13%)	6,26%	6,28%	6,30%

- a. Realisasi Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas untuk Tahun 2020 sebesar 25,64% masih sama dengan Tahun 2019 tetapi mengalami penurunan sebesar 4,26% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2020 sebesar 29,90%.
- b. Realisasi Kinerja Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat untuk Tahun 2020 sebesar 83% masih sama dengan Tahun 2019 tetapi mengalami kenaikan sebesar 1% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2020 sebesar 82%.
- c. Realisasi Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian untuk Tahun 2020 sebesar 6,13% mengalami penurunan 0,01% dari Tahun 2019 dan 0,11% dari Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis untuk Tahun 2020 sebesar 6,24%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Sasaran (%)	Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi			
Sasaran ke-1 : Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM						
Persentase Koperasi Berkualitas	%	29,90	25,64	85,75%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	Bidang Koperasi dan UM
Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	%	82	83	101,21%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	Bidang Koperasi dan UM

Sasaran meningkatnya Koperasi Berkualitas dan UMKM dengan Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas dan Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat dengan Capaian Sasaran di atas 85% dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Kegiatan dari sasaran strategis ini adalah Pemeringkatan Koperasi dan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru, pada tahun 2020 Koperasi yang dievaluasi ada 3 Koperasi dari target 3 Koperasi Tahun 2020. Capaian dari sasaran strategis ini adalah sebesar 100% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020, Jumlah Wirausaha baru yang mengikuti pelatihan pada tahun 2020 tidak mengalami penambahan karena Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru mengalami penghapusan (Refocusing), kegiatan dialihkan untuk Percepatan Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Tapin.

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020		Capaian Sasaran (%)	Kategori	Sumber Data
		Target	Realisasi			
Sasaran ke-2 : Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri						
Persentase PDRB Sektor Perindustrian	%	6,24	6,13	98,23%	Tercapai dengan predikat "Sangat Berhasil"	BPS

Sasaran meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri dengan Indikator Kinerja Persentase PDRB Sektor Perindustrian dengan Capaian Sasaran di atas 90% dapat dikategorikan Sangat Berhasil. Jumlah unit usaha di sektor industri di Kabupaten Tapin tahun 2020 sebanyak 7.123 mengalami peningkatan sebesar 0,96% dibanding tahun 2019 sebanyak 7.055 dengan

Persentase PDRB Sektor Perindustrian sebesar 6,13%. Pada tahun 2020 kelompok industri di Kabupaten Tapin didominasi oleh Industri Kimia, Argo dan Hasil Hutan (IKAHH) yaitu sebesar 87,39%. Data ini bersumber dari BPS Kab. Tapin berdasarkan angka sangat sementara tahun 2019 dikarenakan data untuk tahun 2020 masih belum dikeluarkan oleh BPS Kab. Tapin.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian Sasaran
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	29,90%	25,64%	85,75%	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	42.487.500	31.550.000	74.25
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	82%	83%	101,21%	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	3.025.000	0	0
					Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	30.025.000	0	0
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,24%	6,13%	98,23%	Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	732.100.000	241.778.540	33.02
					Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	170.530.000	165.979.500	97.33
Capaian Kinerja rata-rata				95,06%		978.167.500	439.308.040	44.50%

Secara umum Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian Kab. Tapin Tahun Anggaran 2020 sudah bisa terlaksana dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 95,06%. Dengan capaian kinerja yang lebih tinggi dari realisasi anggaran belanja langsung 95,06% > 44,50%, Dinas Perindustrian Kab. Tapin lebih efisien dalam menggunakan anggaran belanja di Tahun 2020.

Realisasi Anggaran Belanja pada tahun 2020 sebesar 44,50% yang sangat rendah dikarenakan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan protokol Kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran pandemi Covid-19 sehingga beberapa kegiatan mengalami penghapusan (Refocusing), kegiatan dialihkan untuk Percepatan Penanganan Covid - 19 di Kabupaten Tapin.

Pada setiap bidang yang ada di Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, terdapat beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana kegiatan tersebut lebih banyak berupa pembinaan maupun pelatihan. Pada bidang koperasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada, yakni pengurus, pengawas dan anggota koperasi di Kabupaten Tapin dengan diadakannya kegiatan yang berupa penyuluhan, sosialisasi maupun pelatihan. Sedangkan pada bidang industri lebih mengarah kepada pemanfaatan sumber daya alam yang ada untuk bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan disamping berusaha meningkatkan kemampuan para sumber daya manusianya atau para pelaku usaha industri yang ada di Kabupaten Tapin.

6. Analisis Program Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan

Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Berikut ini adalah tabel pencapaian kinerja disertai program pada tahun 2020

yang mempunyai pengaruh besar sebagai penunjangnya :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Program	Anggaran
Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas dan Pertumbuhan UMKM	Persentase Koperasi Berkualitas	29,90%	25,64%	85,75%	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	42.487.500
	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	82%	83%	101,21%	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	3.025.000
					Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	30.025.000
Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase PDRB Sektor Perindustrian	6,24%	6,13%	98,23%	Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	732.100.000
					Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	170.530.000

B. REALISASI ANGGARAN

Salah satu faktor utama penunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis adalah melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dengan semaksimal mungkin. Berikut ini adalah tabel anggaran serta realisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan.

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	732.759.833,00	563.810.429,00	76,94
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	56.400.000,00	37.396.882,00	66,31
Penyediaan jasa administrasi keuangan	57.600.000,00	57.600.000,00	100,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.400.000,00	18.586.750,00	91,11
Penyediaan alat tulis kantor	28.198.440,00	20.121.500,00	71,36
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.000.262,00	9.986.000,00	90,78
Penyediaan makanan dan minuman	41.840.000,00	36.840.000,00	88,05
Tapin Expo	0,00	0,00	0,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	497.921.131,00	366.723.297,00	73,65
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	2.156.000,00	43,12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	198.450.000,00	169.403.084,00	85,36
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	30.450.000,00	11.348.084,00	37,27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	39.350.000,00	36.315.000,00	92,29
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.000.000,00	3.340.000,00	66,80
Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	123.650.000,00	118.400.000,00	95,75
Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	11.000.000,00	10.990.000,00	99,48
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.500.000,00	5.490.000,00	99,82
Penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
Program Peningkatan Kualita sKelembagaan Koperasi	31.550.000,00	31.550.000,00	100,00
Penyuluhan Perpajakan Bagi Koperasi	0,00	0,00	0,00
Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	0,00	0,00	0,00
Pengelolaan Data Koperasi Online	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
Pemeriksaan Koperasi	9.950.000,00	9.950.000,00	100,00
Bimbingan Persiapan RAT Koperasi	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	0,00	0,00	0,00
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru	0,00	0,00	0,00
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	39.625.000,00	0,00	0,00
Pembinaan UP2K	39.625.000,00	0,00	0,00
Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika	173.186.558,00	173.186.558,00	95,84
Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah	73.500.000,00	73.500.000,00	100,00
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK)	99.686.558,00	92.479.500,00	92,77
Sosialisasi Tertib Administrasi dan Peizinan Bidang Perindustrian Bagi Industri Kecil dan Menengah	0,00	0,00	0,00
Program Pembinaan, Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro dan Kimia	488.750.000,00	241.778.540,00	49,47
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tapin Expo	120.500.000,00	0,00	0,00
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Kalsel Expo	0,00	0,00	0,00
Partisipasi Dekranasda Pada Banjarmasin Festival Sasirangan	33.000.000,00	30.358.000,00	91,99
Partisipasi Dekranasda Pada Pameran Tingkat Nasional	83.500.000,00	0,00	0,00
Pendukung Operasional DEKRANASDA KAB. TAPIN	0,00	0,00	0,00
Kegiatan Pengolahan Kaolin	93.500.000,00	87.546.800,00	93,63
Kegiatan Galeri TAMASA	148.650.000,00	121.873.740,00	81,99
Fasilitasi Penerapan standarisasi produk IKM (Hak Merk Produk)	9.600.000,00	2000.000,00	20,83
JUMLAH	1.675.321.391,00	1.183.511.553,00	70,64

Diharapkan dari semua kegiatan dan program yang dilaksanakan serta capaian kinerja yang sudah direalisasikan oleh Dinas Perindustrian pada tahun 2020 tersebut dapat mendukung indikator kinerja pada LKIP Kabupaten Tapin yang terkait dengan Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, yang diantaranya adalah:

✓ Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Dari pelaksanaan program tahun anggaran 2020 yang termuat dalam tabel di atas, terdapat sebanyak 8 (delapan) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang mempunyai total anggaran sebesar Rp.1.675.321.391,- dengan total realisasi yang mencapai Rp.1.183.511.553,- (70,64%). Walaupun realisasi pencapaian kinerja keuangan belanja langsung hanya 70,64% namun secara umum Program dan Kegiatan APBD Dinas Perindustrian Kab. Tapin Tahun Anggaran 2020 sudah bisa terlaksana dengan capaian kinerja rata-rata lebih dari 95,06%.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang dapat dikategorikan berhasil atas sasaran-sasaran strategisnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin, serta dalam rangka perwujudan “*Good Governance*”. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Perindustrian Kabupaten.

Tapin sebagai jabaran visi, misi dan strategi Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaran pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien.

Untuk melihat prospek ke depan, Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin merasakan perlu adanya peningkatan alokasi dana yang lebih besar untuk bisa memacu penanganan kerajinan, mengingat sumber daya alam yang masih cukup besar dan produk unggulan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan secara optimal, agar menjadi lebih bermakna dan produktif sehingga mampu memberikan kontribusi baik untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maupun perekonomian dan pendapatan asli daerah melalui setiap bidang yang ada.